

Amh
Retno 25/3 2025

**DIGITAL PUBLIC SPHERE DALAM MERESPON KEBIJAKAN KENAIKAN BIAYA
PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI MELALUI APLIKASI TWITTER
DI INDONESIA**

Shella Yuli Astuti, Retno Sunu Astuti

Departemen Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
Jl. Prof. H. Soedarto, S.H., Tembalang Semarang Kotak Pos 1269
Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405
Laman: www.iisip.undip.ac.id Email: iisip@undip.ac.id

ABSTRACT

The issuance of Permendikbud No. 2 Year 2024 has an impact on the increase in the cost of education at the tertiary level which then causes a rejection response from the community. Digital transformation has changed the way the public participates in responding to the policy, which is now done through Twitter as a digital public sphere. This study aims to determine the process and pattern of public participation in responding to the policy of increasing tuition fees at the tertiary level carried out through Twitter as a digital public sphere using a mix method. Data were obtained through interviews, observations and data crawling which were then processed descriptively qualitatively and also quantitatively using the social network analysis method to obtain data interpretation. Public participation on Twitter as an accessible digital public sphere allows people to be actively involved in discussions and the formation of public opinion. Intervention from buzzers does not hinder the formation of public opinion so that public participation still succeeds in encouraging the government to cancel the policy of increasing tuition fees at the tertiary level in Indonesia. Social network analysis shows that there is a complex and tenuous network pattern of public participation with diverse discussions in various small groups in the network. Meanwhile, the news media tempodotco became influential in disseminating information and encouraging massive participation to influence the policy of increasing tuition fees at the tertiary level.

Keywords: *policy, public participation, education, digital public sphere*

ABSTRAK

Diterbitkannya Permendikbud No. 2 Tahun 2024 berdampak pada naiknya biaya pendidikan tingkat perguruan tinggi yang kemudian menimbulkan respon penolakan dari masyarakat. Transformasi digital mengubah cara masyarakat dalam melakukan partisipasi publik untuk merespon kebijakan tersebut yang kini dilakukan melalui Twitter sebagai *digital public sphere*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses dan pola partisipasi publik dalam merespon kebijakan kenaikan biaya pendidikan tingkat perguruan tinggi yang dilakukan melalui Twitter sebagai *digital public sphere* dengan menggunakan metode penelitian *mix method*. Data diperoleh melalui wawancara, observasi serta *data crawling* yang kemudian diolah secara deskriptif kualitatif dan juga kuantitatif menggunakan *metode social network analysis* untuk memperoleh interpretasi data. Partisipasi publik di Twitter sebagai *digital public sphere* yang aksesibel memungkinkan masyarakat untuk terlibat aktif dalam diskusi dan pembentukan opini publik. Intervensi dari *buzzer* tidak menghalangi pembentukan opini publik sehingga

partisipasi publik tetap berhasil mendorong pemerintah untuk membatalkan kebijakan kenaikan biaya pendidikan tingkat perguruan tinggi di Indonesia. *Social network analysis* menunjukkan terdapat pola jaringan partisipasi publik yang bersifat kompleks dan renggang dengan diskusi yang beragam dalam berbagai kelompok kecil dalam jaringan. Sementara itu, akun media berita tempodotco menjadi agar akan berpengaruh dalam menyebarkan informasi dan mendorong partisipasi yang masif hingga dapat mempengaruhi kebijakan kenaikan biaya pendidikan tingkat perguruan tinggi tersebut.

Kata kunci: kebijakan, partisipasi publik, pendidikan, *digital public sphere*

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu modal dasar pembangunan suatu negara melalui adanya sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas dengan pola pikir yang lebih baik dan terarah. Revolusi industri dan globalisasi menghadirkan suatu tuntutan yang besar terhadap dunia pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berdaya saing, sebab kini manusia tidak hanya bersaing dengan sesamanya tetapi juga bersaing dengan teknologi (Savitri, 2019).

Situasi tersebut menjadi tidak sebanding dengan kondisi pendidikan di Indonesia yang jumlah lulusan perguruan tingginya hanya mencapai 10% dari total populasi orang dewasa (BPS, 2024). Faktor eksternal berupa kondisi ekonomi menjadi alasan utama rendahnya jumlah lulusan perguruan tinggi di Indonesia (Abdullah & Gani, 2022). Adanya Permendikbud No. 2 Tahun 2024 melatarbelakangi kenaikan biaya kuliah yang tidak wajar dan berdampak pada terhambatnya kesempatan

dan turunnya minat masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi.

Suatu kondisi menarik yang dapat diamati ialah fenomena dimana mahasiswa dan masyarakat umum merespon kebijakan melalui media sosial hingga menjadi viral. Melansir unggahan berita dari Detik.com (27/5/2024) masifnya aksi protes di melalui media sosial mengenai kenaikan biaya pendidikan tinggi yang tidak rasional kemudian ditanggapi dengan pemanggilan Nadiem Makarim oleh Komisi X DPR RI. Pada akhirnya, muncul keputusan berupa pembatalan kebijakan kenaikan UKT dan IPI pada tingkat perguruan tinggi di Indonesia.

Fenomena tersebut dapat terjadi mengingat media sosial memberikan pengaruh positif dalam meningkatkan partisipasi publik pada proses pengambilan keputusan sekaligus sebagai ruang diseminasi isu-isu kebijakan publik (Zhang, 2023). Melalui media sosial masyarakat dapat menentang kebijakan atau

mengusulkan audiensi terhadap pemerintah dengan upaya yang terencana (Latifah & Najicha, 2022). Masyarakat mampu berkontribusi dengan melakukan mengambil peran dalam pengambilan keputusan melalui partisipasi dalam diskursus di media sosial.

Metode partisipasi publik yang dulu diselenggarakan secara konvensional melalui media-media mainstream dan perkumpulan pada suatu ruang publik kini beralih menuju partisipasi publik dengan metode baru di ruang publik yang terdigitalisasi (Rahman et al., 2023). Pergeseran penggunaan ruang publik tersebut dilatarbelakangi oleh modernisasi yang meningkatkan penggunaan media sosial. We Are Social (2025) menyatakan pada tahun 2024 hingga 2025 telah terjadi peningkatan pengguna aktif media sosial di Indonesia sebesar 2,9% sehingga kini total pengguna media sosial mencapai 143 juta pengguna pada Januari 2025.

Munculnya beragam bentuk dari media digital yang salah satunya berupa Twitter mampu memunculkan bentuk aksi kolektif baru dan pengorganisasian partisipasi publik yang dilakukan secara digital (Thiel, 2023). Contoh konkretnya adalah ketika publik menunjukkan sikap dan respon terhadap kebijakan kenaikan biaya pendidikan perguruan tinggi melalui aplikasi Twitter sebagai salah satu *digital public sphere*. Perkembangan media sosial

sebagai bentuk dari *digital public sphere* yang interaktif memungkinkan adanya penetrasi yang lebih besar terhadap partisipasi masyarakat termasuk dalam merespon kebijakan dari pemerintah sebagai bagian dari proses demokrasi.

Munculnya twitter sebagai *digital public sphere* tidak dapat dilepaskan dari pemikiran Jurgen Habermas terkait konsep ruang publik atau *public sphere* itu sendiri. Ruang publik di sini bukan merujuk pada suatu institusi maupun organisasi melainkan suatu tempat bagi warga negara untuk berpartisipasi dan terlibat dalam dialog terbuka mengenai isu-isu publik (Hardiman, 2010). Habermas (2012) memberikan definisi *public sphere* sebagai suatu ranah kehidupan sosial manusia yang ditujukan untuk memenuhi kepentingan dari publik sehingga memungkinkan terbentuknya suatu kesepakatan kolektif.

Digitalisasi dan perkembangan media turut mempengaruhi perkembangan *public sphere* dimana internet menyediakan cara-cara baru untuk mempengaruhi kebijakan dan aktif secara politik (Papacharissi, 2002). Fuchs (2021) mengungkapkan bahwa transisi ini membentuk perkembangan *public sphere* yang bertransformasi menjadi *digital public sphere* yaitu sebuah dimensi dari ruang publik dimana pengetahuan dipublikasikan dalam format digital dan

menjadi bahan perdebatan publik secara kritis melalui dunia maya.

Penelitian Ihsan dan Adnan (2022) membuktikan bahwa Twitter memberikan ruang untuk memengaruhi undang-undang cipta kerja melalui aktor yang bebas membangun wacana dan meningkatkan partisipasi publik untuk menolak kebijakan. Kajian *content analysis* milik Khatami & Kurnia (2022) membuktikan bahwa akun-akun aktivis, *influencer*, dan media massa memimpin diskursus perdebatan pemecatan pegawai KPK yang menegaskan bahwa Twitter efektif untuk menerapkan demokrasi pada ruang publik yang terdigitalisasi.

Penelitian terdahulu turut menyatakan bahwa Twitter menjadi ruang publik alternatif yang memprakarsai pembentukan jaringan komunikasi pada saat pandemi Covid-19 di Swiss sehingga warga dapat membentuk opini publik dan melakukan diskusi secara bebas meskipun sedang berada di tengah krisis (Rauchfleisch et al., 2021). Selain itu, analisis kuantitatif turut menyatakan bahwa publik dapat menunjukkan dukungan terhadap kebijakan yang diambil pemerintah dalam menghadapi krisis melalui Twitter (Kurten & Beullens, 2021).

Dengan memadukan analisis deskriptif kualitatif dengan *social network analysis*, penelitian ini berusaha untuk melengkapi kekurangan dari penelitian

terdahulu yang menggunakan teori yang sama. Tujuan dari penelitian ini ialah menganalisis partisipasi publik serta pola jaringan partisipasi publik dalam merespon kebijakan kenaikan biaya pendidikan perguruan tinggi di Indonesia melalui Twitter sebagai *digital public sphere*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan melalui Twitter dengan menggunakan metode *mix method* atau kombinasi pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Dengan mengaplikasikan metode tersebut dapat diperoleh data yang lengkap sehingga memberikan gambaran yang komprehensif terkait partisipasi publik melalui Twitter sebagai *digital public sphere* dalam merespon kebijakan kenaikan biaya pendidikan tingkat perguruan tinggi di Indonesia. Data diperoleh melalui wawancara, observasi dan *data crawling* melalui aplikasi Twitter yang dibatasi pada periode 1 April 2024 hingga 31 Mei 2024. Guna memastikan kualitas data digunakan triangulasi sumber, teknik dan waktu.

Analisis data dilakukan menggunakan metode *Social Network Analysis* dengan *software* Gephi 0.10 yang dipadukan dengan analisis deskriptif kualitatif. Melalui analisis tersebut didapatkan interpretasi data yang mampu menggambarkan pelaksanaan partisipasi publik serta pola jaringan partisipasi publik

yang terjadi selama masyarakat memberikan respon terhadap kebijakan kenaikan biaya pendidikan tingkat perguruan tinggi melalui aplikasi Twitter pada awal tahun 2024.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Partisipasi Publik dalam Merespon Kebijakan Kenaikan Biaya Pendidikan Perguruan Tinggi di Indonesia

1. Forum Partisipasi

Forum yang digunakan masyarakat untuk melakukan partisipasi publik dalam menolak kebijakan kenaikan biaya pendidikan tingkat perguruan tinggi yakni secara daring melalui media sosial Twitter. Twitter menjadi forum yang bebas, praktis dan tidak terpengaruh oleh batasan geografis maupun batasan waktu. Selain itu, Twitter tidak memiliki limitasi terkait kapasitas.

Dalam kasus penolakan kebijakan kenaikan biaya pendidikan tingkat perguruan tinggi melalui Twitter ditemukan adanya intervensi dari pemerintah melalui *buzzer*. *Buzzer* melakukan intervensi dengan menggiring opini publik dan mengalihkan perhatian publik ke isu lain yang lebih aktual. Opini yang dibentuk oleh *buzzer*

digunakan sebagai justifikasi dan menggiring opini publik bahwa kebijakan kenaikan biaya pendidikan tingkat perguruan tinggi mendapatkan dukungan publik yang luas. Kondisi ini melemahkan kritik terhadap kebijakan dan meningkatkan potensi pemerintah untuk tidak melakukan perubahan kebijakan.

Adanya intervensi *buzzer* tidak menghalangi terbentuknya opini publik dalam forum Twitter. Opini publik terbentuk melalui *tweet* yang saling terhubung dan penggunaan *hashtag* secara masif. *Tweet* berisi tuntutan perubahan kebijakan kenaikan biaya pendidikan perguruan tinggi yang memuat *hashtag* ini menimbulkan tekanan politik kepada pemerintah. Tuntutan dan opini publik yang menentang kebijakan kenaikan biaya pendidikan tingkat perguruan tinggi tersebut yang mendesak pemerintah hingga akhirnya menghasilkan suatu perubahan terhadap kebijakan.

2. Akses Untuk Menyampaikan Aspirasi

Twitter sebagai forum partisipasi publik dapat diakses dengan mudah asalkan memiliki

akun yang terdaftar. Dengan akses yang begitu mudah untuk menjangkau Twitter, masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap saluran partisipasi tradisional dapat tetap terlibat aktif dalam diskusi untuk merespon kebijakan kenaikan biaya pendidikan tingkat perguruan tinggi. Aksesibilitas forum yang tinggi memungkinkan masyarakat dari berbagai kalangan untuk menyuarakan pendapat secara inklusif dan meningkatkan visibilitas isu kebijakan tersebut.

Akun *mention* *confess* dengan ribuan pengikut membuat akses informasi menjadi lebih luas dan meningkatkan peluang topik pembahasan mengenai kebijakan kenaikan biaya pendidikan tingkat perguruan tinggi menjadi *trending topic*. Ketika telah menjadi *trending topic* maka aksesibilitas informasi dan kesadaran publik untuk ikut serta dalam merespon kebijakan tersebut meningkat. *Trending topic* memberikan akses informasi yang besar terkait kebijakan kenaikan biaya pendidikan tingkat perguruan tinggi memunculkan probabilitas yang agar diskursus mengenai kebijakan tersebut segera ditanggapi oleh pemerintah.

Fitur-fitur Twitter memiliki peran besar dalam menciptakan akses yang tinggi terhadap jaringan partisipasi. *Retweet* meningkatkan aksesibilitas pada jaringan partisipasi dengan menyetujui suatu opini yang telah diunggah. *Reply* memungkinkan pengguna untuk memberikan tanggapan. *Quote retweet* memberi perspektif kritis terhadap kebijakan kenaikan biaya pendidikan tingkat perguruan tinggi. Kondisi ini meningkatkan kemungkinan opini publik terbentuk dan partisipasi yang dilakukan dapat memengaruhi kebijakan secara konkret.

3. Keterlibatan Dalam Proses Partisipasi

masyarakat memiliki kemampuan untuk terlibat dalam proses tersebut yang diawali dengan berekspresi dan berinteraksi dengan cara-cara seperti penggunaan *meme*, *like*, *reply*, *retweet*, dan *mention*. Interaksi memperkuat partisipasi publik saat merespon kebijakan kenaikan biaya pendidikan tingkat perguruan tinggi sehingga mampu mendorong terjadinya perubahan terhadap kebijakan tersebut. Interaksi tidak hanya berlangsung antara sesama

masyarakat, tetapi antara masyarakat dengan pemerintah yang meningkatkan probabilitas diberikannya respon balik dari pemerintah.

Masyarakat merealisasikan kemampuannya untuk terlibat dalam proses diskusi melalui fitur *reply* dan *space* secara anonim. Diskusi terbuka di Twitter menunjukkan aspirasi masyarakat tersampaikan secara langsung dalam merespon dengan mengkritik kebijakan kenaikan biaya pendidikan tingkat perguruan tinggi. Diskusi menyatukannya pendapat masyarakat menjadi opini publik yang digunakan sebagai landasan untuk menuntut pemerintah melakukan revisi terhadap kebijakan kenaikan biaya pendidikan perguruan tinggi.

Dalam proses diskusi turut terjadi penurunan kualitas wacana publik dalam merespon kebijakan kenaikan biaya pendidikan tingkat perguruan tinggi. Penurunan kualitas wacana membuat masyarakat menjadi provokatif karena adanya disinformasi yang mempersulit pembentukan opini publik. Padahal, diperlukan opini publik yang kuat dengan landasan argumen yang berkualitas agar

kebijakan kenaikan biaya pendidikan tingkat perguruan tinggi dapat diubah melalui respon yang diberikan pemerintah.

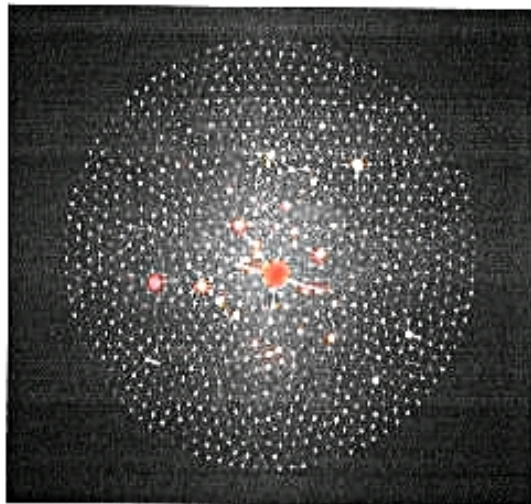
Seluruh masyarakat yang melakukan partisipasi publik untuk merespon kebijakan kenaikan biaya pendidikan tingkat perguruan tinggi memiliki kemampuan yang sama untuk terlibat dalam proses pembentukan opini publik. *Tweet* yang diunggah akan terhubung dengan *tweet* dari pengguna lain sehingga terakumulasi membentuk opini publik hingga pembahasan menjadi viral. Ketika isu kebijakan kenaikan biaya pendidikan tingkat perguruan tinggi ini menjadi viral, aspirasi masyarakat tersampaikan dan membentuk tekanan pada pemerintah sehingga mampu membatalkan kebijakan kenaikan biaya pendidikan tingkat perguruan tinggi pada akhir bulan Mei 2024.

B. Pola Jaringan Partisipasi Publik dalam Merespon Kebijakan Kenaikan Biaya Pendidikan Perguruan Tinggi Melalui Aplikasi Twitter

1. Pola Jaringan Partisipasi Publik

Dalam visualisasi pola jaringan partisipasi publik, titik-titik menyimpulkan *node* atau aktor yang mengunggah suatu respon

sedangkan garis-garis adalah *edges* yaitu hubungan atau relasi yang dimiliki oleh para aktor. Berikut adalah visualisasi pola jaringan partisipasi publik dalam merespon kebijakan kenaikan biaya pendidikan perguruan tinggi.



Gambar 1. Pola Jaringan Partisipasi
Sumber: Gephi, Olah Data Peneliti (2025)

Terdapat *node* sebanyak 964 yang disertai dengan 734 *edges*. melalui angka tersebut dapat dipahami bahwa terdapat 964 aktor yang terlibat dalam partisipasi publik untuk merespon kebijakan kenaikan biaya pendidikan tingkat perguruan tinggi yang disertai dengan 734 relasi guna melakukan pembahasan kebijakan. Aktor yang saling terkoneksi dalam sebuah pola jaringan partisipasi publik menandakan adanya pembahasan kebijakan kenaikan biaya

pendidikan tingkat perguruan tinggi yang konsisten dilakukan dalam jumlah yang besar.

Diameter jaringan bernilai 19 dengan nilai *average degree* dalam jaringan partisipasi publik tersebut adalah 1.523 yang cukup rendah karena hanya bernilai satuan. Ini menunjukkan bahwa aktor pada jaringan tersebut lemah dalam membangun relasi pada jaringan yang besar. Sulitnya membangun relasi ini berpengaruh pada pembentukan opini publik terkait kebijakan kenaikan biaya pendidikan tingkat perguruan tinggi yang terhambat karena aspirasi yang diunggah masyarakat menjadi lebih sulit terhubung.

Graph density bernilai 0.002 dimana nilai ini lebih dekat dengan 0 daripada 1 yang menunjukkan minimnya intensitas interaksi antaraktor. Artinya, relasi yang terjalin tidak intens dan mencerminkan tidak terlalu banyak diskusi untuk membahas kebijakan kenaikan biaya pendidikan tingkat perguruan tinggi.

Pengelompokkan aktor dalam jaringan atau *modularity* yang nilainya semakin mendekati 1 maka semakin banyak kelompok atau *cluster* yang terbentuk. Nilai

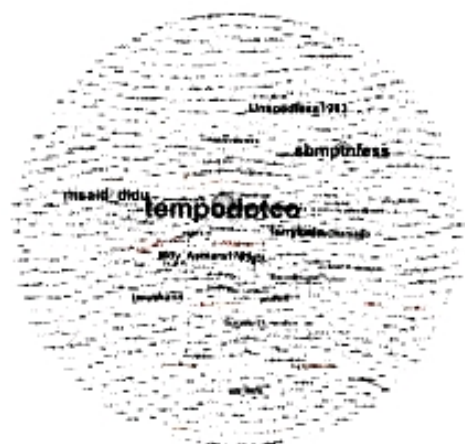
modularity pada jaringan partisipasi publik untuk merespon kebijakan kenaikan biaya pendidikan tingkat perguruan tinggi adalah 0.955 yang menunjukkan terbentuknya banyak kelompok atau *cluster*. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa respon yang diberikan sangat beragam dan komprehensif sehingga kebijakan kenaikan biaya pendidikan tingkat perguruan tinggi tersebut dapat ditelaah melalui berbagai persepsi.

2. Aktor-Aktor yang Berpengaruh Dalam Jaringan

Untuk mengetahui aktor yang berpengaruh perlu dilakukan pengukuran nilai *degree centrality*. Semakin tinggi nilai *degree centrality* maka semakin populer pula aktor tersebut. Akun tempodotco menjadi pemilik *degree centrality* tertinggi dengan skor 35. Aktor dengan *degree centrality* tinggi memiliki peran untuk memperluas jangkauan partisipasi dengan penyebaran informasi terkait isu kebijakan kenaikan biaya pendidikan tingkat perguruan tinggi yang lebih masif. Dengan diseminasi informasi yang tinggi maka akan lebih mudah untuk

mengambil perhatian publik dan menjaring banyak partisipan.

Berikut adalah visualisasi pola jaringan partisipasi publik dalam merespon kebijakan kenaikan biaya pendidikan tingkat perguruan tinggi berdasarkan *degree centrality*:



Gambar 2 Pola Jaringan Berdasarkan *Degree Centrality*

Sumber: Gephi, Olah Data Peneliti (2025)

Dalam melakukan telaah pada aktor yang berpengaruh dapat dilakukan analisis *closeness centrality* berdasarkan kedekatan. Pada pengukuran derajat ini difokuskan untuk melihat jarak kedekatan antara aktor satu dengan aktor yang lain dengan skala 0 hingga 1. Dalam analisis yang telah dilakukan didapati lebih dari 100 aktor yang memiliki nilai *closeness centrality* 1.0. Berikut ditampilkan

20 akun teratas dari perhitungan analisis *closeness centrality*:

Tabel 1. Daftar 20 Aktor dengan Nilai *Closeness Centrality* Tertinggi

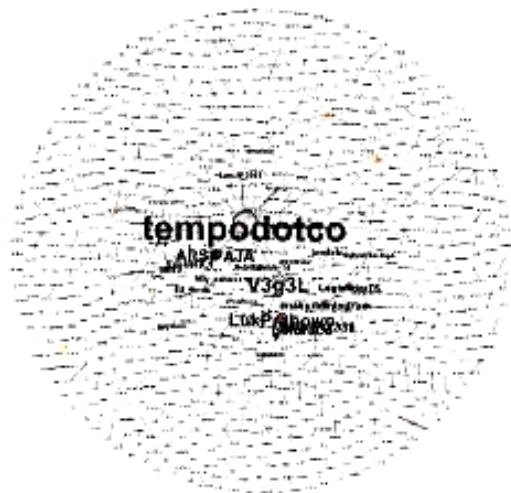
No.	Aktor	No.	Aktor
1.	ub_mfs	11.	feroferraferri
2.	Boediantara	12.	jahterra
3.	Tan_Mar3M	13.	aniesbaswedan
4.	kgblgnunfaedh	14.	WongAlasRoban
5.	timpenguinnas	15.	undipmenfess
6.	MbulGendut	16.	IndahJuli
7.	Ndrewtjan	17.	VIVAcoid
8.	hrdbacot	18.	PartaiSocmed
9.	gilang_ahm31272	19.	PrakarsaWin
10.	asboediono_id	20.	Strategi_Bisnis

Sumber: Gephi, Olah Data Peneliti (2025)

Penentuan aktor-aktor yang berpengaruh dalam pola jaringan dapat ditentukan dengan menghitung *betweenness centrality* untuk mengidentifikasi posisi dari aktor sebagai perantara informasi. Semakin tinggi nilai *betweenness centrality* maka semakin tinggi pula peran aktor tersebut dalam menjembatani persebaran informasi. Tempodotco merupakan aktor dengan sentralitas keberantaraan tertinggi dengan nilai 22875.1. *Tweet* milik tempodotco mampu menjembatani interaksi

aktor-aktor sehingga memungkinkan lebih banyak aktor untuk saling berinteraksi dan berdiskusi dalam sebuah jaringan. Kondisi ini meningkatkan intensitas diskusi dalam merespon kebijakan kenaikan biaya pendidikan perguruan tinggi.

Berikut adalah visualisasi pola jaringan partisipasi publik dalam merespon kebijakan kenaikan biaya pendidikan tingkat perguruan tinggi berdasarkan *betweenness centrality*:



Gambar 3. Pola Jaringan Berdasarkan *Betweenness Centrality*

Sumber: Gephi, Olah Data Peneliti (2025)

Pengukuran *eigenvector centrality* merupakan pengukuran sentralitas yang didasarkan pada koneksi yang dimiliki oleh satu aktor dengan aktor yang lain sehingga berperan dalam

penyebaran informasi, penggerak diskusi, maupun inisiator dalam suatu *cluster* di dalam jaringan. Skala penilaiannya adalah 0 hingga 1 yang berarti semakin mendekati nilai 1 maka semakin tinggi pula nilai *eigenvector centrality*, akun dengan *username* tempodotco memiliki nilai *eigenvector centrality* tertinggi dengan nilai 1.

Berikut adalah visualisasi pola jaringan partisipasi publik dalam merespon kebijakan kenaikan biaya pendidikan tingkat perguruan tinggi berdasarkan *eigenvector centrality*:



Gambar 4. Pola Jaringan Berdasarkan *Eigenvector Centrality*
Sumber: Gephi, Olah Data Peneliti (2025)

Sebagai media berita, tempodotco rutin mempublikasikan informasi aktual yang akurat terkait dengan kebijakan kenaikan biaya

pendidikan tingkat perguruan tinggi. Melalui *tweet* berita yang tersebut tempodotco membangun koneksi dengan masyarakat dan mengembangkan diskusi hingga terbentuk suatu kelompok yang fokus membahas isu kebijakan kenaikan biaya pendidikan tingkat perguruan tinggi melalui kolom komentar. Konektivitas akun tempodotco yang tinggi dan kemampuannya untuk membentuk suatu kelompok kecil (*cluster*) dalam pola jaringan partisipasi publik membuat diskusi dalam merespon kebijakan kenaikan biaya pendidikan tingkat perguruan tinggi menjadi semakin kuat.

C. Pembahasan

Twitter menjadi forum digital yang praktis dan efisien untuk melakukan partisipasi publik sebab memiliki fitur-fitur yang mampu meningkatkan aksesibilitas pengguna untuk berpartisipasi melalui dunia maya. Smyrniotis & Baisnée (2023) mengungkapkan bahwa internet melatarbelakangi terjadinya fenomena tersebut sebab internet memacu pertumbuhan platform digital dan meningkatkan aksesibilitas publik terhadap informasi isu serta konten politik yang berdampak pada semakin meningkatnya kebebasan masyarakat untuk berekspresi.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa terdapat kecenderungan untuk menggunakan akun anonim ketika melakukan partisipasi dalam merespon kebijakan kenaikan biaya pendidikan tingkat perguruan tinggi. Habermas (2022) telah menyelaraskan teorinya dengan perkembangan teknologi dan memaparkan bahwa media sosial memunculkan ruang publik baru yang memungkinkan terjadinya penyebaran informasi dan diskusi publik secara anonim.

Kecenderungan penggunaan akun anonim pada saat melakukan partisipasi publik meningkatkan minat masyarakat untuk berpartisipasi (Perbawani et al., 2018). Di sisi lain hal tersebut mendorong terbentuknya tirani massal yang berpotensi merusak pondasi utama dari ruang publik yakni pertukaran informasi yang logis dan rasional (Ubayasiri, 2006). Anonimitas ini turut mendorong munculnya *buzzer* yang akan mempengaruhi kualitas wacana pada partisipasi melalui *digital public sphere*.

Penurunan kualitas wacana disebabkan oleh adanya *echo chambers* yang mendistorsi diskusi publik (Swastiningsih et al., 2024). Masyarakat yang terjebak dalam *echo chambers* di media sosial mengalami penurunan kualitas wacana dan keterbukaan terhadap pandangan yang berbeda perspektif (Khairina et.al, 2022). Kondisi ini mengurangi efektivitas partisipasi publik

dalam proses kebijakan sebab tidak adanya pemahaman yang komprehensif dari berbagai sudut pandang untuk memahami permasalahan dari sebuah kebijakan.

Aktor-aktor dominan dalam jaringan partisipasi berperan dalam melakukan diseminasi informasi sehingga diskursus mampu terjadi secara luas. Fenomena ini dijelaskan oleh Tagoe & Zhang (2024) yang menyatakan bahwa media sosial seperti Twitter membuka jalan terhadap partisipasi publik terutama dalam proses pengambilan keputusan kebijakan publik. Media sosial menjadi forum yang layak digunakan untuk mengunggah informasi dan meningkatkan hubungan publik dengan pemerintah pada saat memformulasikan kebijakan (Reianu dan Dobra, 2024).

Keberhasilan dari partisipasi publik melalui Twitter dalam merespon kebijakan kenaikan biaya pendidikan tingkat perguruan tinggi telah menjadi bukti konkret bahwa partisipasi yang dilakukan secara digital perlu dipertimbangkan oleh pemerintah. Diperlukan penyediaan *digital public sphere* yang representatif dan bebas dari intervensi sangat diperlukan untuk memfasilitasi kegiatan partisipasi publik yang demokratis. Denhardt dan Denhart (2007) menilai bahwa hal tersebut menjadi kewajiban dari pemerintah, sebab dalam rangka menjaga iklim partisipasi publik yang demokratis pemerintah berkewajiban

menyediakan forum partisipasi publik yang bersifat tidak langsung dalam bentuk yang lain seperti *digital public sphere*.

KESIMPULAN

Partisipasi publik terjadi pada forum daring yakni Twitter sebagai *digital public sphere*. Partisipasi publik memiliki aksesibilitas yang tinggi terhadap forum, informasi dan jaringan partisipasi sehingga masyarakat memiliki kemampuan yang besar untuk terlibat dalam proses interaksi, diskusi dan pembentukan opini publik. Meskipun terdapat intervensi dari *buzzer* dan juga penurunan kualitas wacana karena adanya pengaruh anonimitas, tetapi partisipasi tetap mampu menghasilkan opini publik yang berhasil mendapatkan respon dari pemerintah yang melakukan pembatalan kebijakan kenaikan biaya pendidikan tingkat perguruan tinggi.

Pola jaringan partisipasi publik yang terbentuk merupakan jaringan yang besar dan renggang. Hal ini menunjukkan intensitas interaksi yang minim. Namun, keberadaan banyak kelompok atau *cluster* dalam jaringan mengindikasikan bahwa telah terjadi diskusi yang komprehensif. Melalui pengolahan data menggunakan Gephi 0.10 dengan metode *social network analysis* untuk mengukur nilai *degree centrality*, *betweenness centrality*, *closeness centrality*, dan *eigenvector centrality* didapatkan aktor yang paling

berpengaruh dalam pola jaringan partisipasi tersebut yaitu tempodotco. Sebagai akun media berita, tempodotco konsisten menyebarluaskan informasi terkait kebijakan kenaikan biaya pendidikan tingkat perguruan tinggi sehingga persebaran informasi menjadi luas dan memicu banyak diskusi yang masif melalui Twitter hingga berhasil mempengaruhi kebijakan kenaikan biaya pendidikan tingkat perguruan tinggi tersebut.

SARAN

Berkaitan dengan partisipasi publik yang dilakukan melalui Twitter sebagai *digital public sphere* disajikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Pemerintah diharapkan mampu memberi tanggapan yang lebih bijak terhadap partisipasi publik dengan meminimalisir penggunaan *buzzer* guna menjaga legitimasi dari pemerintah sekaligus menjaga pondasi utama *digital public sphere* yang bebas dari intervensi.
2. Guna menjaga kualitas wacana dalam partisipasi di *digital public sphere* perlu dilakukan pemeriksaan informasi oleh masyarakat sebelum opini diunggah. Di samping itu, masyarakat diharapkan mampu menjadi lebih selektif dalam menerima segala informasi yang tersebar melalui Twitter.

3. Disajikan rekomendasi bagi pengelola Twitter untuk mempertimbangkan penggunaan algoritma yang lebih representatif dan objektif guna menunjang partisipasi publik melalui Twitter sebagai *digital public sphere*.

Berkenaan dengan pola jaringan partisipasi publik yang terbentuk maka diberikan rekomendasi kepada aktor-aktor yang berpengaruh yakni sebagai berikut:

1. Aktor-aktor yang berpengaruh pada pola jaringan partisipasi publik hendaknya mampu untuk menjaga netralitas serta meningkatkan akurasi dan kredibilitas informasi pada saat mengunggah aspirasi ketika berpartisipasi melalui *digital public sphere*.
2. Direkomendasikan pula bagi peneliti selanjutnya agar mampu menjalankan penelitian dengan isu yang lebih aktual disertai dengan data yang lebih kompleks dengan jumlah yang lebih besar.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, I., & Gani, M. I. A. (2022). Analisis Faktor Penyebab Kurangnya Minat Remaja Terhadap Pendidikan Perguruan Tinggi. *Cetta: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 5(2), 128–137.
- Badan Pusat Statistik. (2024). Persentase Penduduk. *Badan Pusat Statistik*, diakses pada 20 Desember 2024 <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/I/MTYxMCMx/persentase-penduduk-umur-15-tahun-ke-atas-menurut-klasifikasi-desa--jenis-kelamin--dan-jenjang-pendidikan-tertinggi-yang-ditamatkan--2009-2024.html>
- Denhardt, J. V., & Denhardt, R. B. (2007). *The New Public Service: Serving Not. Steering* (Expanded). New York: M.E. Sharpe.
- DetikCom. 2024. Kronologi UKT: Sempat Naik Tinggi, Turun Setelah Nadiem Dipanggil Jokowi. DetikCom, diakses pada tanggal 7 November 2024 melalui <https://www.detik.com/edu/pendidikan-tinggi/d-7360180/kronologi-ukt-semat-naik-tinggi-turun-setelah-nadiem-dipanggil-jokowi>
- Fuchs, C. (2021). The Digital Commons and the Digital Public Sphere How to Advance Digital Democracy Today. *Westminster Papers in Communication and Culture*, 16(1).
- Habermas, J. (2012). The Public Sphere: An Encyclopedia Article. In *Media and Cultural Studies: Keywords* (2nd edition). Malden: Wiley-Blackwell.
- Habermas, J. (2022). Reflections and Hypotheses on a Further Structural Transformation of the Political Public Sphere. *Theory, Culture & Society*, 39(4), 145–171.
- Hardiman, F. B. (2010). *Ruang publik: Melacak "partisipasi demokratis" dari polis sampai cyberspace*. Yogyakarta: Kanisius.
- Ihsan, M., & Adnan, R. S. (2022). Media Sosial Twitter sebagai Ruang Publik Virtual (Studi Kasus Penolakan Omnibus Law). *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(3).
- Kemp, Simon. (2025b). Digital 2025: Indonesia. *We Are Social*, diakses pada 27 Februari 2025 melalui <https://datareportal.com/reports/digital-2025-indonesia>

- Khairina, Jasmine, Kresna Faza R., M. Zhafran Haris, Rury Kharisma M, dan Yasmin Nyala A. Fenomena Echo Chambers di Media Sosial dan Dampaknya Terhadap Polarisasi Politik bagi Mahasiswa. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 9(2), 121-130.
- Khatami, M. I., & Kurnia, N. (2022). E-Demokrasi pada Perdebatan Publik di Twitter: Analisis Konten Polemik Pemecatan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). *Jurnal Riset Komunikasi*, 5(1), 51-69.
- Kurten, S., & Beullens, K. (2021). #Coronavirus: Monitoring the Belgian Twitter Discourse on the Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 Pandemic. *Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking*, 24(2), 117-122.
- Latifah, K. N., & Najicha, F. U. (2022). Implikasi Media Sosial Terhadap Formulasi Kebijakan Publik. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(1).
- Papacharissi, Z. (2002). The virtual sphere: The internet as a public sphere. *New Media & Society*, 4(1), 9-27.
- Perbawani, P. S., Rahayu, R., & Anshari, I. N. (2018). Netizens Anonymity in Indonesia's Digital Democracy: Political Participation in Social Media According to the Online Disinhibition Effect Theory. *PCD Journal*, 6(2), 185.
- Rahman, M. A., Afifah, Z. N., Ma'rifah, I., Laras Lestari, D., Heryanto, G. G., & Hermansah, T. (2023). Ruang Publik Dan Perubahan Sosial: Pemanfaatan Internet Untuk Advokasi Dan Deseminasi Isu Penundaan Pemilu Studi Kasus Mafindo Dan Drone Emprit. *Ekspresi dan Persepsi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 6(3), 554-565.
- Rauchfleisch, A., Vogler, D., & Eisenegger, M. (2021). Public Sphere in Crisis Mode: How the COVID-19 Pandemic Influenced Public Discourse and User Behaviour in the Swiss Twitter-sphere. *Javnost - The Public*, 28(2), 129-148.
- Reianu, Diana Gabriella, & Dorin Mircea Dobra. Digital Public Consultation and the Opportunity for Participatory Democracy: An Expkanatory Study. *Social Science*, 13(12), 16-36.
- Savitri, A. (2019). *Bonus Demografi 2030: Menjawab Tantangan serta Peluang Edukasi 4.0 dan Revolusi Bisnis 4.0*. Semarang: Penerit Genesis.
- Smyrmaios, N., & Baisnée, O. (2023). Critically understanding the platformization of the public sphere. *European Journal of Communication*, 38(5), 435-445.
- Swastiningsih, S., Aziz, A., & Dharta, Y. (2024). The Role of Social Media in Shaping Public Opinion: A Comparative Analysis of Traditional vs. Digital Media Platforms. *The Journal of Academic Science*, 1(6), 620-626.
- Tagoe, H., & Zhang, M. (2024). Social Media's Influence on Public Administration. *International Journal of Social Science and Economics Invention*, 10(03).
- Thiel, T. (2023). A polarizing multiverse? Assessing Habermas' digital update of his public sphere theory. *Constellations*, 30(1), 69-76.
- Ubayasiri, K. (2006). Internet and the Public Sphere. *EJournalist*, 6(2).
- Zhang, M. (2023). Digital Lifeworld and Communicative Interaction: Conceptualizing the Transformative Potentials of Social Networking in the Public Sphere. *Journal of Linguistics and Communication Studies*, 2(4), 121-131.